

Implementasi Kebijakan Vaksinasi Booster Covid-19 di Puskesmas Wae Codi Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai

Anjela Marni Jekui¹⁾, Sapto Pramono²⁾, Nihayatus Sholichah³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: marnianjela@gmail.com

ABSTRAK

Mengenai pelonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah harus mencari cara untuk menangani kasus Covid-19 yang sedang naik daun di Indonesia. Pemerintah pusat juga telah mengambil tindakan sepihak terhadap penanganan Covid-19. Program vaksin pertama di negara Indonesia pertama kali dilakukan dilakukan pada 13 Januari 2021, dengan Presiden Joko Widodo menerima suntikan pertama. Jenis vaksin yang telah dan digunakan di Indonesia diantaranya AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, dan Sinovacm (RI, 2019). Dalam pelaksanaannya pemberian vaksinasi *Booster* Covid-19 di Puskesmas Wae Codi memiliki kendala yang dialami. Pertama, dalam pelaksanaannya pemberian vaksinasi *Booster* Covid-19 di Puskesmas Wae Codi memiliki kendala yang dialami yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi *Booster* Covid-19, mereka beranggapan tidak perlu vaksin booster lagi di karenakan pandemi covid sudah berakhir. Kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat info vaksinasi *Booster* Covid-19 yang di lakukan oleh pihak puskesmas Wae Codi. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 Juli 2022 masyarakat menyebutkan bahwa pihak puskesmas jarang sosialisasi kepada masyarakat Cibal Barat sehingga masyarakat mudah terhasut hoax bahaya Covid-19. Berdasarkan data dari Puskesmas Wae Codi total orang yang meninggal 3 orang dan yang sembuh 3 orang, sedangkan untuk yang penerima dosis pertama sebanyak 9861, dosis kedua sebanyak 7255, dan dosis ketiga sebanyak 511. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III diantaranya komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori George C. Edward III di Puskesmas Wae Codi, implementasi kebijakan vaksinasi *Booster* dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal dikarenakan pada aspek sumber daya, belum terpenuhinya materi sosialisasi mengenai dampak vaksinasi *Booster* terhadap kesehatan. Sedangkan faktor pendukung adalah struktur birokrasi, komunikasi, dan disposisi yang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yaitu tenaga medis yang ada di Puskesmas Wae Codi memberikan pelayanan kesehatan pastinya melayani mereka dengan baik. Serta masyarakat di Kecamatan Cibal Barat antusias dalam program vaksin yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak Puskesmas Wae Codi mengadakan puskesmas keliling dan mimbar gereja.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Vaksinasi *Booster*, Covid-19

Abstract

Regarding the spike in Covid-19 cases in Indonesia, the Government must find a way to deal with Covid-19 cases which are currently on the rise in Indonesia. The central government has also taken unilateral action in handling Covid-19. The first vaccine program in Indonesia was first carried out on January 13 2021, with President Joko Widodo receiving the first injection. The types of vaccines that have been and are used in Indonesia include AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, and Sinovacm (RI, 2019). In the implementation of the Covid-19 Booster vaccination at the Wae Codi Community Health Center there were problems experienced. Firstly, in the implementation of the Covid-19 Booster vaccination at the Wae Codi Community Health Center there were obstacles experienced, namely the lack of public awareness about the importance of the Covid-19 Booster vaccination, they thought that there was no need for a booster vaccine anymore because the Covid pandemic was over. Second, there is a lack of information on the Covid-19 Booster vaccination carried out by the Wae Codi Community Health Center to the public. Based on initial observations made by researchers on July 19 2022, the community stated that the community health center rarely provided outreach to the West Cibal community so that the community was easily incited by hoaxes about the dangers of Covid-19. Based on data from the Wae Codi Community Health Center, a total of 3 people died and 3 people

recovered, while 9,861 received the first dose, 7,255 for the second dose, and 511 for the third dose. This research uses George C. Edward III's theory, including communication, resources, attitudes, and bureaucratic structure. By using qualitative research. Based on the results of research using George C Edward III's theory at the Wae Codi Community Health Center, it can be said that the implementation of the Booster vaccination policy has not run optimally due to the resource aspect, there has been no provision of socialization material regarding the impact of Booster vaccination on health. Meanwhile, the supporting factors are the bureaucratic structure, communication and disposition which can be said to be running well due to several factors, namely the medical personnel at the Wae Codi Health Center providing health services certainly serve them well. And the people in West Cibal District are enthusiastic about the vaccine program carried out by the government and the Wae Codi Health Center holding mobile health centers and church pulpits.

Keywords: Policy Implementation, Booster Vaccination, Covid-19

A. LATAR BELAKANG

Virus Covid-19 atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang pada sistem pernafasan. Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2021 mencapai angka 4.237.834 terkonfirmasi dan 4.079.120 dinyatakan sembuh. Pelonjakan kasus Covid-19 di Indonesia meningkat, Pemerintah harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah pusat juga telah mengambil tindakan sepihak penanganan Covid-19. Sebagai akibat dari Covid-19 yang dianggap darurat di seluruh dunia dan ancaman bagi dunia, pemerintah harus mengambil tindakan terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan serius.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Kebijakan vaksinasi pertama terhadap virus Covid-19 akan diberikan pada tanggal 13 Januari 2021. Menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengembangkan kebijakan vaksinasi Covid-19 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2021 tentang Amendemen Atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 Tentang Pembelian Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo menerima suntikan pertama sebagai bagian dari program vaksinasi Indonesia pada 13 Januari 2021 Program. Vaksinasi Ini dilakukan dalam gelombang pertama disediakan untuk ini dilakukan dalam beberapa gelombang, yaitu gelombang pertama diberikan kepada tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Untuk gelombang kedua diberikan kepada masyarakat rentan dan masyarakat umum (Kemenkes RI, 2021a). Jenis vaksin yang telah dan digunakan di Indonesia adalah AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm dan Sinovac. Semua jenis vaksin tersebut memiliki efektivitas yang berbeda berdasarkan uji klinisnya. WHO menjelaskan bagaimana keberhasilan vaksinasi dapat dievaluasi menggunakan tiga metrik yaitu kemanjuran, efektivitas, dan dampak vaksin.

Permasalahan tentang vaksin memang menjadi wacana dan rencana yang saat ini kurang lebih ditunggu banyak orang, setelah dilanda masa pandemic Covid-19. Virus Covid-19 ini juga berhasil membuat pemerintah memaksa menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah (Budiarjo, 2008). Selain itu, pemerintah menetapkan undang-undang untuk masyarakat sesuai dengan kerangka hukum yang harus diikuti dan karenanya diberikan kekuasaan yang memaksa (Maclver, 1926 dalam Budiarjo, 2008).

Dalam hal ini, kebijakan program sosialisasi vaksinasi oleh Dinas Kesehatan yang implementasikan pada Puskesmas Wae Codi Kecamatan Cibal, Barat Kabupaten Manggarai.

Diketahui bahwa dari total jumlah warga Kecamatan Cibal Barat yaitu 14.056 jiwa sebanyak 17.627 orang sudah pernah melakukan vaksin dan sasaran penerima vaksin yaitu semua warga kecamatan Cibal Barat.

Dalam pelaksanaannya pemberian vaksinasi *Booster* Covid-19 di Puskesmas Wae Codi memiliki kendala-kendala yang dialami. Pertama yaitu dalam pelaksanaannya, pemberian vaksinasi *Booster* untuk Covid-19 di Puskesmas Wae Codi memiliki kendala yang dialami yaitu kurangnya pemahaman publik tentang signifikansi pentingnya vaksinasi *Booster* Covid-19. Mereka beranggapan tidak perlu vaksin *Booster* lagi dikarenakan pandemi Covid sudah berakhir. Kedua yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat info vaksinasi *Booster* Covid-19 yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Wae Codi. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 Juli 2022, masyarakat menyebutkan bahwa pihak puskesmas jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Cibal Barat sehingga masyarakat mudah terhasut hoax akan bahaya adanya Covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan vaksin *Booster* Covid-19 di Puskesmas Wae Codi Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan vaksin *Booster* Covid-19 di Puskesmas Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *public policy* memiliki beragam arti dan makna. Menurut Thomas R. Dye (1992), *public policy is whatever governments choose to do or not to do?* (Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

Sedangkan menurut James E. Anderson (1970), *public policies are those policies developed by governmental bodies and officials?* (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Menurut Kartasasmita (2018), kebijakan publik adalah upaya untuk memahami dan menginterpretasikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai satu masalah, apa penyebabnya dan apa pengaruhnya. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian gerakan yang dibuat dan dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dengan tujuan yang jelas dalam pikiran untuk mengatasi suatu masalah.

2. Konsep Kebijakan Publik

Menurut etimologinya, kata kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti negara atau kota. Sedangkan menurut bahasa Latin yaitu *politia* yang berarti negara. Terakhir, kata *policie*, yang mengacu pada manajemen urusan publik atau administrasi pemerintahan. Kebijakan biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang atau aktor (misalnya seorang pejabat suatu perusahaan atau organisasi pemerintah) atau beberapa pemain di suatu daerah kegiatan tertentu. Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum kata atau frase kebijakan digunakan untuk menggambarkan tindakan satu atau lebih aktor di suatu area (seperti pejabat, organisasi, atau badan pemerintah).

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses atau tahapan yang penting dalam sebuah siklus kebijakan. Bagaimanapun, sebuah kebijakan yang telah dihasilkan apabila tidak dilaksanakan maka akan sia-sia atau tidak dapat mengatasi suatu permasalahan. Anderson (1979) mengatakan

bahwa implementasi kebijakan atau program merupakan bagian dari *administrative process* (proses administrasi). Proses administrasi sebagaimana yang dikatakan oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat.

Van Horn dan Van Meter (Agustino, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi mencapai tujuan yang ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan. Mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama prosedur legitimasi berhasil dan alokasi sumber daya dan pendanaan yang disepakati tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi. Kebijakan mengisyaratkan keinginan untuk berbuat sesuai struktur implementasi. Suatu desain kebijakan yang berbeda dapat mempengaruhi implementasi dalam skala lebih luas.

4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah tugas untuk mengevaluasi tingkat kinerja seseorang. kebijakan. Jika suatu kebijakan telah ada untuk sementara waktu, evaluasi dapat dilakukan karena jika dilakukan terlalu cepat, hasilnya dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin panjang waktu yang diperlukan untuk menganalisis suatu kebijakan, semakin strategis kebijakan tersebut. Di sisi lain, evaluasi dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat semakin teknis suatu kebijakan atau program. diterapkannya kebijakan yang bersangkutan (Subarsono, 2005).

5. Teori Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards III

Model implementasi dari Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan

proses implementasi. Penekanan Prosedur ini didasarkan pada gagasan bahwa jika pelaksana benar-benar mematuhi persyaratan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya *output* dan *outcomes* kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang melengkapinya.

Metode yang digunakan untuk mengkaji bagaimana program konservasi energi dilaksanakan didasarkan pada gagasan George C. Edwards III. Implementasi dapat dimulai dengan penyelidikan prasyarat untuk implementasi kebijakan dan kondisi abstrak untuk mencapai keberhasilan. Model implementasi dari George C Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah dan untuk menjelaskan proses implementasi. Fokus pada prosedur ini didasarkan pada gagasan bahwa jika pelaksana benar-benar mematuhi kriteria pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan, maka dengan sendirinya *output* dan *outcomes* kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melengkapinya.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi George C. Edwards III

a) Komunikasi

Faktor ini dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan efisien apabila langkah-langkah dan tujuan kebijakan telah dijabarkan secara jelas bagi mereka yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan langkah-langkah dan tujuan kebijakan secara tepat kepada para pelaksana. Keseragaman serta konsistensi terhadap

aturan agar pelaksana dapat sepenuhnya memahami ruang lingkup dan tujuan kebijakan, premis, dan tujuan harus dikomunikasikan dengan jelas.

Dalam sebuah perusahaan, komunikasi adalah sebuah proses yang amat kompleks. Seseorang biasa menggunakannya atau menyebarkannya hanya untuk kepentingan tertentu. Disamping itu adanya informasi yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Agar Implementasi yang efektif dapat dicapai, tetapi seseorang harus memutuskan dan menentukan apakah mereka mampu melaksanakannya. Bahwa pelaksanaan kebijakan harus disepakati oleh semua pihak dan pegawai agar maksud dan tujuan kebijakan dapat dipahami secara jelas dan benar.

Jika ada pihak pengambil keputusan menemukan spesifikasi yang tidak jelas, pihak kebijakan tentunya akan kesulitan memahami tentang apa yang sesungguhnya dan yang sedang dialihkan. Jika terpaksa, para pelaksana kebijakan akan merasa tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan, yang akan menghalangi mereka untuk menghasilkan hasil yang efektif dan ideal. Implementasi kebijakan akan sangat terhambat oleh kurangnya kontak dengan pelaksana.

b) Sumber Daya

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, tingkat keahlian pelaksana atau staf, informasi yang jelas dan relevan untuk pemenuhan sumber daya terkait dalam pelaksanaan program dan mendukung kebijakan, adanya kewenangan untuk memastikan bahwa program dapat diarahkan sebagaimana dimaksud, serta tersedianya fasilitas penunjang.

c) Sikap (*Disposition*)

Sikap pelaksana merupakan faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu kebijakan di implementasikan. Jika pelaksana setuju

atau mereka setuju dengan sebagian besar isi kebijakan, mereka akan dengan senang hati menerapkannya. Namun, jika pendapat mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi dapat mengalami kesulitan dan bahkan dapat menimbulkan banyak masalah.

Ada tiga jenis sikap atau tanggapan pelaksana terhadap suatu kebijakan: kesadaran akan kebijakan, mengikuti petunjuk pelaksanaan untuk menerima atau menolak program, dan kekuatan tanggapan. Pelaksana mungkin menyadari tujuan program. Namun seringkali tujuannya tidak tercapai secara tepat dikarenakan mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara diam mereka alihkan dan menghindari implementasi program tersebut. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program, bantuan dari pejabat pelaksana juga sangat penting.

d) Struktur Birokrasi

Kerangka birokrasi dan organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan. Ciri-ciri, harapan, dan pola interaksi yang berulang sering membentuk struktur birokrasi. Sumber daya yang dimiliki badan eksekutif untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki hubungan prospektif dan aktual dengan mereka.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut para ahli Sugiyono (2003:19) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral dalam (Hutami, 2017).

Menurut Husaini dan Purnomo, (2009:130) pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan kata-

kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatar belakangi. Oleh karena itu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu implementasi kebijakan vaksinasi *Booster Covid-19* di Puskesmas Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian kualitatif ini hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian ini sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini yang dapat dikaji oleh peneliti yaitu fokus terhadap implementasi kebijakan vaksinasi *Booster Covid-19* di Puskesmas Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Alasan peneliti menggunakan teori George C. Edward III sangat penting dalam penelitian yaitu memberikan kerangka konseptual yang terstruktur dan koheren, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti dalam perspektif yang benar.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah salah satu Desa yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Alamat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Wae Codi, Desa Golowoi, Kecamatan Cibal

Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Implementasi Kebijakan Vaksinasi *Booster Covid-19* di Puskesmas Wae Codi

Penelitian ini menggunakan teori George C Edward III yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat dari keberhasilan kebijakan program melalui empat indikator, diantaranya:

a) Komunikasi

Faktor ini dalam implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi yang dilakukan pihak Puskesmas Wae Codi adalah terjun langsung ke masyarakat untuk menjalankan sosialisasi vaksinasi *booster* di Puskesmas Wae Codi, ternyata kondisi di lapangan menunjukkan pihak puskesmas belum efektif melaksanakan sosialisasi.

b) Sumber Daya

Komponen sumber daya ini terdiri jumlah staf keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya yang diterapkan oleh pihak puskesmas Wae Codi dalam

melaksanakan program vaksinasi *Booster Covid-19* terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya dana. Pada aspek sumber daya manusia, terdapat 16 tenaga medis yang telah terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Sedangkan pada aspek dana, pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar 1,09 miliar pada tahun 2021 dan 3,5 miliar pada tahun 2022. Dana ini dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan vaksinasi *Booster*.

c) Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel disposisi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, dikarenakan beberapa faktor yaitu tenaga medis yang ada di Puskesmas Wae Codi telah memberikan pelayanan kesehatan dengan baik.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, bagan struktur organisasi di Puskesmas Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat telah berhasil diatur dan sudah terjadi kewenangan pelaksanaan kebijakan vaksinasi *Booster Covid-19* di puskesmas tersebut.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Vaksinasi *Booster Covid-19* di Puskesmas Wae Codi

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori George C. Edward III. Faktor pendukung di Puskesmas Wae Codi, diantaranya:

- a) Berdasarkan variabel komunikasi, maka dapat dikatakan belum efektif dikarenakan pihak Puskesmas Wae Codi mengadakan puskesmas keliling dan mimbar gereja yang bertujuan untuk sosialisasi kepada masyarakat Cibal Barat. Hal tersebut berdampak positif pada adanya kesadaran masyarakat Cibal Barat akan pentingnya vaksinasi *Booster Covid-19*.
- b) Berdasarkan variabel disposisi, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yaitu tenaga medis yang ada di Puskesmas Wae Codi yang memberikan pelayanan kesehatan dengan baik. Serta masyarakat di Kecamatan Cibal Barat antusias dalam program vaksin yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak Puskesmas Wae Codi rutin mengadakan puskesmas keliling dan mimbar gereja bertujuan untuk sosialisasi kepada masyarakat Cibal Barat.
- c) Berdasarkan variabel struktur birokrasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Sudah terdapat pedoman SOP pelaksanaan vaksinasi *Booster Covid-19*. SOP merupakan pedoman tenaga kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi *Covid-19*, sebagai dasar hukum dan tolak ukur kedisiplinan tim vaksinator dalam pelaksanaan *Covid-19*. SOP pelaksanaan vaksinasi berdasarkan Kepmenkes RI tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*. SOP sudah dijalankan dengan baik dan tidak ada perbedaan dengan pelaksana.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Vaksinasi *Booster Covid-19* di Puskesmas Wae Codi

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori George C. Edward III, faktor penghambat di Puskesmas Wae Codi terletak pada variabel sumber daya. Sumber daya dalam proses implementasi belum berjalan dengan baik dikarenakan belum terdapat materinya sosialisasi berkaitan dengan pentingnya vaksinasi *Booster Covid-19*.

Tidak hanya itu, puskesmas juga terkonfirmasi tidak memiliki dana kecuali dari Dinas Kesehatan yang hanya digunakan untuk perjalanan dinas dari tenaga kesehatan atau petugas untuk pergi melakukan kegiatan vaksinasi. Fasilitasnya pihak puskesmas sudah bekerja sama dengan desa, misalnya di desa A ada kegiatan vaksinasi berarti pihak puskesmas mengeluarkan surat untuk desa tersebut bahwa tanggal sekian ada jadwal vaksinasi untuk desa tersebut dan yang menyediakan fasilitasnya desa itu sendiri seperti tempat, kursi, meja dan juga termasuk sasaran warganya juga ditanggung oleh desa itu sendiri. Dalam hal ini, pihak puskesmas hanya menyediakan atau menanggung vaksin dan untuk sosialisasi tergantung pada keadaan vaksin. Jika dari pihak Dinas Kesehatan menginformasikan tersedianya vaksin, maka pihak puskesmas akan melakukan sosialisasi atau membuat jadwal untuk kegiatan vaksinasi.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori George C Edward III di Puskesmas Wae Codi dapat ditarik kesimpulan, diantaranya:

- Pada variabel komunikasi belum berjalan secara maksimal dikarenakan pihak puskesmas belum efektif dan efisien dalam melaksanakan sosialisasi.
- Pada variabel sumber daya maka dapat dikatakan dalam proses implementasi

belum berjalan dengan baik dikarenakan materinya sosialisasinya belum tersedia.

- Pada variabel disposisi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yaitu tenaga medis yang ada di Puskesmas Wae Codi memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan dengan baik.
- Pada variabel struktur birokrasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dikarenakan semua tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Wae Codi, patuh pada penerapan SOP pelaksanaan vaksinasi *Booster Covid-19*. Karena SOP merupakan pendoman tenaga kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19, sebagai dasar hukum dan tolak ukur kedisiplinan tim vaksinator dalam pelaksanaan Covid-19.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori George C. Edward III di Puskesmas Wae Codi tentang implementasi kebijakan vaksinasi *Booster Covid-19*, pada variabel sumber daya maka pihak puskesmas harus sigap dalam menyediakan materi sosialisasi kepada masyarakat Cibal Barat terkait Covid-19. Serta untuk ketiga variabel komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi harus dipertahankan dalam proses implementasi kebijakan di Puskesmas Wae Codi.

REFERENSI

- Apriliana, S. (2022). *Responsibilitas Pelayanan Publik Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 (Studi di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)*. *Disertasi*. Universitas Wiraraja Madura.
- Hasibuan, S. H., Abidin, S. Z., & Nugroho, K. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Guru Di Sekolah Menengah Atas Ypi Amir Hamzah Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 237–249.

- Jariah, A. (2021). Implementasi literasi digital dalam peningkatan daya tarik wisata di era new normal Kota Palangka Raya. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(1), 74–87.
- Kurniawan, D., & Sutan, A. J. (2021). Penggunaan Sosial Media Dalam Menyebarkan Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 27–34.
- Mustari, N. (2013). Gambaran Pengetahuan Ibu Post Partum Tentang Asi Eksklusif di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 2(5), 131–144.
- Rafii, A., Indarajaya, K., & Hikmah, N. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). *Journal Administrasi Publik*, 6(1), 10–25.
- Ratri, D. K. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Disertasi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Sukmana, R. A., Yansyah, M. I., Wijaya, B. A., & Kurniawati, M. F. (2021). Implementasi Strategi Komunikasi Kesehatan dalam Meyakinkan Masyarakat untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Sains Sosial Humaniora*, 5(1), 409–419.
- Suandi, I. W. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 1–18.
- Sugiyono, L. P., & Subandriani, D. N. (2014). Gambaran Pengetahuan, Sikap, Praktik Serta Identifikasi Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus pada Penjamah dan Makanan di PT PSA (Pelita Sejahtera Abadi). *Jurnal Riset Gizi*, 2(2), 56–66.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Utami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1) 10–19.
- Widyaningsih, N., Nurlaela, S., & Titisari, K. H. (2019). Earning Per Share, Debt To Equity Ratio, Current Ratio Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sub-Sektor Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 3(1), 141–154.

